

Cakupan Implementasi Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Keterangan: Cakupan Implementasi Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Provinsi Maluku Utara Tahun 2025

Tahun: 2025

Sumber: Biro Hukum

NO	RANPERDA	RANPERKADA	KAB/KOTA	KET
1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025 - 2045.		Kab. Halmahera Timur	
2	Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Kab. Halmahera Timur	
3	Penyelenggaraan Kearsipan		Kab. Halmahera Timur	
4	Pengelolaan Pasar		Kab. Halmahera Timur	
5	Perlindungan, Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal		Kab. Halmahera Timur	
6	Pengelolaan Air Limbah Domestik		Kab. Halmahera Timur	

NO	RANPERDA	RANPERKADA	KAB/KOTA	KET
7	Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman		Kab. Halmahera Timur	
8	Desa Wisata		Kab. Halmahera Timur	
9	Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan		Kab. Halmahera Timur	
10	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum		Kab. Halmahera Timur	
11	Penanggulangan Kemiskinan		Kab. Halmahera Timur	
12	Penyelenggaraan Kepariwisataaan		Kab. Halmahera Timur	
13	Pengelolaan sampah		Kab. Halmahera Timur	
14	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Politeknik Perdamaian Halmahera (PADAMARA) di Kabupaten Halmahera Utara		Kab. Halmahera Utara	

NO	RANPERDA	RANPERKADA	KAB/KOTA	KET
15	Hilirisasi Kelapa Kabupaten Halmahera Utara		Kab. Halmahera Utara	
16	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara		Kab. Halmahera Utara	
17	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah		Kab. Pulau Taliabu	
18	Sistem Pemasaran terpadu Komoditas Pertanian dan Hasil Tangkap Nelayan		Kab. Pulau Taliabu	
19		Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kab.Pulau Taliabu	Kab. Pulau Taliabu	
20		Tata Naska Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu	Kab. Pulau Taliabu	
21		Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Pulau Taliabu Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Kab. Pulau Taliabu	
22		Tata Cara Pengalokasian dan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025	Kab. Pulau Taliabu	
23		Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2025	Kab. Pulau Taliabu	

NO	RANPERDA	RANPERKADA	KAB/KOTA	KET
24	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 - 2029		Kab. Halmahera Barat	
25	Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah		Kab. Halmahera Tengah	
26	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Kab. Halmahera Tengah	
27	Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan		Kab. Halmahera Tengah	
28	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)		Kab. Halmahera Tengah	
29	Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2025 - 2045		Kab. Pulau Morotai	
30	Perubhan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah		Kab. Pulau Morotai	
31	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)		Kota Ternate	
	Kota Ternate Tahun 2025 - 2029			

NO	RANPERDA	RANPERKADA	KAB/KOTA	KET
32		Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan	Kab. Halmahera Selatan	
		dan Teknologi Serta Inovasi Kabupaten Halmahera Selatan		
		Tahun 2025 -2029		
33		Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan dan Pengelolaan	Kab. Halmahera Selatan	
		Barang Milik Daerah		
34	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		Kab. Kepulauan Sula	
35	Pakaian adat Kabupaten Kepulauan Sula		Kab. Kepulauan Sula	
36	Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Sula		Kab. Kepulauan Sula	
37	Pengelolaan Sampah		Kab. Kepulauan Sula	
38	Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah		Kab. Kepulauan Sula	

NO	RANPERDA	RANPERKADA	KAB/KOTA	KET
	Daerah			
39	Kawasan Tanpa Rokok		Kab. Kepulauan Sula	
40	Rancangan Peraturan DPRD Kab. Kepulauan Sula Tentang		Kab. Kepulauan Sula	
	Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			
41	Rancangan Peraturan DPRD Kab. Kepulauan Sula Tentang		Kab. Kepulauan Sula	
	Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			
42	Rancangan Peraturan DPRD Kab. Kepulauan Sula Tentang		Kab. Kepulauan Sula	
	Ber Acara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan			
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			